



BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis akan sajikan beberapa kesimpulan dan saran – saran berkeanaan dengan masalah-masalah “Implementasi Affirmative Action Dalam Proses Kandidasi Perempuan Di DPD Partai Golongan Karya DIY Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009” yang merupakan tema sentral dalam penelitian ini.

A. Kesimpulan

1. Implementasi Affirmative Action dalam proses kandidasi DPD Partai Golkar di Pemilu tahun 2009 pada dasarnya cukup baik. Keberhasilan 2 kader politik DPD Partai Golkar Ibu Ranny dan Ibu Nurjannah menjadi anggota legislatif merupakan salah satu contoh konkrit Partai Golkar mendukung dan berupaya agar ada wakil-wakil perempuan dikursi legislatif. Dan itu adalah usaha keras dan upaya yang begitu besar atas pencapaian tersebut. Akan tetapi Golkar juga belum bisa dikatakan maksimal dalam pencapaian ini karena, masih banyak calon legislatif perempuan yang gagal daripada yang lolos dilegislatif. Masih banyaknya kader laki-laki yang lolos dilegislatif dari pada kader perempuan, posisi yang tidak seimbang ini diharapkan kedepannya terus berusaha memberikan akses yang seluas-luasnya kepada perempuan.
2. Faktor-faktor Keberhasilan Ibu Ranny dan Ibu Nurjannah juga dikemas secara baik oleh proses kandidasi mereka yang dapat dikatakan begitu matang. Isu-isu politik yang mereka timbulkan dimasyarakat menjadi poin utama kesan positif dari masyarakat. Dan struktur kesempatan politik dari

DPP Partai Golkar juga lah,yang mengakomodasi mereka untuk berperan aktif dalam segala aktivitas partai.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian dan menemukan berbagai temuan dilapangan, serta berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran terkait "Implementasi *Affirmative Action* Dalam Proses Kandidasi Perempuan di DPD Partai Golongan Karya Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009",Adapun Saran-saran yang penulis rekomendasikan sebagai berikut :

1. Keterwakilan perempuan di legislatif jangan hanya dilihat dari segi kuantitas yang tercermin dari banyaknya perempuan yang menjadi anggota DPRD,tetapi harus disertai dengan kualitas yang memadai. Oleh karena itu, parpol harus menciptakan sistem pengkaderan yang adil dan terbuka untuk perempuan.Partai Golkar diharapkan juga kedepannya mengatur keterwakilan perempuan ini pada AD/ART Partai, sehingga Partai Golkar benar-benar maksimal dalam upaya memajukan perempuan diranah politik.
2. Semua anggota legislatif,baik laki-laki maupun perempuan,harus memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang. Dalam hal ini laki-laki diharapkan untuk dapat menghargai dan memberikan kepercayaan lebih terhadap perempuan,sepertii halnya dapat mendengar aspirasi mereka,bahkan mendorong para anggota legislatif perempuan untuk aktif dan berani berpendapat didepan umum walau dominasi laki-laki begitu kuat.